



Pengaruh Kebijakan Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Keberadaan Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara

Suci Karlina Aziz, Lidin Wiwah Jaya Putra, Kasful Anwar US, Sya'roni

Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: sucikarlina46417@gmail.com, lidin230899@gmail.com,

kasfulanwarus@uinjambi.ac.id, syaroni@uinjambi.ac.id

Alamat: Jln. Arif Rahman Hakim No. 111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361

Korespondensi penulis: sucikarlina46417@gmail.com

Abstract : *The study of this paper discusses the ethical political policy of the Dutch colonial government towards the existence of Islamic educational institutions in the archipelago, the discussion of the research of this paper to find out how the history of the existence of Islamic educational institutions in the archipelago, the ethical politics of the Dutch colonial government, and the influence of ethical political policies on Islamic educational institutions. Islamic education in Indonesia has emerged and developed in various forms of various institutions, such as Islamic boarding schools, madrasas, surau, and musholah. In its development, Islamic education in Indonesia is characterized by the emergence of various educational institutions gradually, ranging from very simple ones, to stages that are considered modern and complete. The goal is not only to enrich the treasures of science with Islamic nuances, but also as a reference and comparison material for Islamic education managers in the following periods. This is in line with the principle generally adopted by the Indonesian Islamic community, which is to maintain the good traditions of the past and take new good traditions again. In this way, the efforts to develop Islamic educational institutions will not be radically rooted in their culture. The ethis politics or the politics of revenge of the Dutch colonial government to the Indonesian colonial people is a policy of the Dutch royal government to repay the sacrifices of the Indonesian people during the implementation of the cultuur stelsel or forced planting system. the people of the archipelago.*

Keywords: *Ethical Politics, Islamic Education Institute, Nusantara*

Abstrak : Kajian makalah ini membahas mengenai kebijakan politik etis pemerintah colonial belanda terhadap keberadaan lembaga pendidikan islam di nusantara, pembahasan penelitian makalah ini untuk mengetahui bagaimana sejarah keberadaan lembaga pendidikan islam di Nusantara, politik etis pemerintah kolonial Belanda, dan pengaruh kebijakan politik etis terhadap lembaga pendidikan islam. Pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang dalam berbagai bentuk lembaga yang bervariasi, seperti pesantren, madrasah, surau, dan musholah. Dalam perkembangannya, pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang amat sederhana, sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan lengkap. Tujuannya selain untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang bernuansa keislaman, juga sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi para pengelola pendidikan Islam pada masa-masa berikutnya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang umumnya dianut masyarakat Islam Indonesia, yaitu mempertahankan tradisi masa lampau yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang baik lagi. Dengan cara demikian, upaya pengembangan lembaga pendidikan Islam tersebut tidak akan terserabut dari akar budayanya secara radikal. Politik etis atau politik balas budi pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat jajahan Indonesia merupakan kebijakan pemerintah kerajaan Belanda untuk membalas pengorbanan rakyat Indonesia selama dilaksanakannya *cultuur stelsel* atau sistem tanam paksa. rakyat Nusantara.

Kata kunci: Politik Etis, Lembaga Pendidikan Islam, Nusantara

1. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari amanat konstitusi, pendidikan merupakan sarana utama dalam pembentukan pola pikir manusia dalam hal untuk peningkatan peradaban dan elevasi manusia. Bicara mengenai pendidikan pasti sangatlah rumit dan kompleks, komponen-komponen pendidikan seperti tenaga pendidik, sekolah, lingkungan, dan lain-lain saling terkait

membentuk jaringan yang disebut sebagai sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang ada pada masa kini merupakan sistem yang lahir melalui proses sejarah yang panjang dan rumit. Sistem pendidikan lahir melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Di Indonesia, pendidikan tentu berkembang akibat interaksi dengan negara-negara luar yang datang ke tanah air, salah satunya adalah Belanda, Negara yang berhasil menancapkan pengaruh paling besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia yang pada masa itu bernama Hindia Belanda. Berawal dari ranah ekonomi (baca: perdagangan), lambat laun Belanda semakin menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa yang pada akhirnya kekuasaan Belanda merambah ranah politis, yaitu dengan mendirikan pemerintahan dan mengurus kekayaan demi keuntungan yang besar. Masuknya Belanda ke ranah politis ini kemudian yang berdampak pada banyak hal, termasuk sektor pendidikan. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada 1619 M, yaitu ketika Jan Pieter Zoon Coen menduduki Batavia. Secara umum, penjajahan Belanda ini dapat dibagi ke dalam 2 (dua) periode: masa VOC (*Vereenigde Oost indische Compagnie*) dan masa pemerintah Hindia Belanda (*Nederlands Indie*).

2. KAJIAN TEORITIS

A. Sejarah Keberadaan Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara

Pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan berkembang dalam berbagai bentuk lembaga yang bervariasi, seperti pesantren, madrasah, surau, dan musholah. Dalam perkembangannya, pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang amat sederhana, sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan lengkap. Lembaga pendidikan Islam telah memainkan perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zamannya. Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah menarik perhatian para ahli baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan studi ilmiah secara konferensif. Kini sudah banyak sekali hasil karya penelitian para ahli yang menginformasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut. Tujuannya selain untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang bernuansa keislaman, juga sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi para pengelola pendidikan Islam pada masa-masa berikutnya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang umumnya dianut masyarakat Islam Indonesia, yaitu mempertahankan tradisi masa lampau yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang baik lagi. Dengan cara demikian, upaya pengembangan lembaga pendidikan Islam tersebut tidak akan terserabut dari akar budayanya secara radikal.

Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, masjid merupakan satu-satunya pusat berbagai kegiatan. Baik kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, maupun kegiatan pendidikan. Bahkan kegiatan pendidikan yang berlangsung di masjid masih bersifat sederhana kala itu sangat dirasakan oleh masyarakat muslim. Maka tidak mengherankan apabila masyarakat dimasa itu menaruh harapan besar kepada masjid sebagai tempat yang bisa membangun masyarakat muslim yang lebih baik. Awal mulanya masjid mampu menampung kegiatan pendidikan yang diperlukan masyarakat. Namun karena terbatasnya tempat dan ruang, mulai dirasakan tidak dapat menampung masyarakat yang ingin belajar. Maka dilakukanlah berbagai pengembangan secara bertahap hingga berdirinya lembaga pendidikan Islam yang secara khusus berfungsi sebagai sarana menampung kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan masyarakat saat itu. Dari sinilah mulai muncul beberapa istilah lembaga pendidikan di Indonesia.

Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia bisa dilihat antara lain: Pertama, Kerajaan Islam Aceh. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudera Pasai di daerah Aceh yang berdiri pada abad ke-10 M, dengan rajanya yang pertama Al Malik Ibrahim Bin Mahdun, yang kedua bernama Al Malik Al Saleh dan yang terakhir bernama Al Malik Sabar Syah (tahun 1444 M/abad ke 15H).

Seorang pengembara dari Maroko yang bernama Ibnu Batutah pada tahun 1345 M sempat singgah di Kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Al Malik Al Zahir saat perjalanan ke Cina. Ibnu Batutah menuturkan bahwa ia sangat mengagumi kerajaan Samudera Pasai dimana rajanya sangat alim dalam ilmu agama dan menganut mazhab Syafii, fasih berbahasa Arab dan mempraktekkan pola hidup sederhana. Berdasarkan pendapat Ibnu Batutah tersebut dapat ditarik kepada system pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Samudera Pasai, yaitu: (1) Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat ialah Fiqh mazhab Syafii. (2) System pendidikannya secara informal berupa majlis ta'lim dan halaqah (3) Tokoh pemerintahannya merangkap sebagai tokoh agama. (4) Biya pendidikan agama bersumber dari negara.

Kedua, Kerajaan Islam di Jawa. Salah seorang raja Majapahit yang bernama Sri Kertabumi mempunyai istri yang beragama Islam yang bernama Putri Cempa, dari Putri Cempa inilah lahir seorang putra yang bernama Raden Fatah yang dikemudian hari menjadi raja kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu kerajaan Demak. Tentang berdirinya kerajaan Demak para ahli sejarah berbeda pendapat, sebagian berpendapat bahwa kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 M. pendapat ini berdasarkan atas jatuhnya kerajaan Majapahit. Ada pula yang berpendapat bahwa kerajaan Demak berdir pada tahun 1518 M. Hal ini berdasarkan bahwa

pada tahun tersebut merupakan tahun berakhirnya masa pemerintahan Prabu Udara Brawijaya VII yang mendapat serbuan tentara Raden Fatah dari Demak.

Berdirinya kerajaan Islam Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut maka penyiaran agama Islam semakin luas serta pendidikan dan pengajaran Islam pun bertambah maju. Sistem pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak punya kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral di suatu daerah. Disana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi seorang guru yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Wali suatu daerah diberi gelar resmi, yaitu gelar Sunan dengan ditambah nama daerahnya, seperti Sunan Gunung Jati.

B. Politik Etis Pemerintah Kolonial Belanda

Politik yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi, kesejahteraan rakyat, serta efisiensi, dikenal dengan nama politik ethis. Politik ethis ini berakar, baik pada masalah kemanusiaan maupun pada keuntungan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya “Kecaman-kecaman terhadap pemerintahan bangsa Belanda yang dilontarkan dalam buku *Max Havelaar* (1860) dan berbagai pengungkapan lainnya mulai membuahakan hasil”. Politik ethis (*ethische politiek*) atau politik balas budi adalah “Kebijakan pemerintah kerajaan Belanda untuk membalas pengorbanan rakyat Indonesia selama dilaksanakannya *cultuurstelsel*. Pencetus politik ethis adalah *Conrad Theodore van Deventer*”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa politik ethis atau politik balas budi pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat jajahan Indonesia merupakan kebijakan pemerintah kerajaan Belanda untuk membalas pengorbanan rakyat Indonesia selama dilaksanakannya *cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa.

Politik balas budi disebut juga sebagai politik etis. Pada laman dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bahwa politik etis merupakan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral kepada kesejahteraan rakyat Nusantara.

Anak-anak perempuan dididik untuk mempersiapkan diri menjadi ibu rumah tangga, mereka diharuskan belajar memasak, menjahit, dan membatik yang merupakan rutinitas di rumah. Kedudukan perempuan pada masa kolonial masih dalam konservatisme dan sangat terikat oleh adat.

C. Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Lembaga Pendidikan Islam

Pada kisaran abad ke-19 sampai abad ke-20 politik etis ini berkembang bersamaan dengan perubahan arah baru dari politik kolonial partai Belanda, kala itu politik ini juga

dinamakan dengan politik Kolonial dari pada Pendidikan moral. Mengutip dari buku karya Sartono Kartodirdjo, bahwa Politik Etis juga disebut dengan politik paternaslisasi atau perlindungan karena rakyat Indonesia dalam pemerintahan hanya dianggap sebagai objek daripada partisipan. Namun dengan adanya Politik Etis tersebut tentu saja berhasil membuat perubahan baru terhadap rakyat Nusantara, salah satunya adalah munculnya berbagai macam kalangan yang terdidik, adanya saluran irigasi untuk pertanian dan perkebunan, juga terjadinya perpindahan penduduk dalam transmigrasi.

Politik etis yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak tahun 1901 membawa dampak positif bagi kemajuan rakyat Indonesia, salah satunya adalah dengan munculnya kaum elite terpelajar. Keberadaan kaum elite terpelajar tersebut kelak akan menjadi motor penggerak pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Salah satu program politik etis yang memberikan kesadaran terhadap nasib bangsa Indonesia yang dibedakan kedudukannya dalam masyarakat kolonial adalah edukasi. Edukasi atau pendidikan dinilai sebagai jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk memperbaiki nasib rakyat, karena dengan adanya perbaikan pendidikan maka nasib rakyat akan menjadi lebih baik.

Pemberlakuan politik etis di Hindia Belanda melahirkan sekolah-sekolah bagi kaum pribumi. Bukan hanya sekolah rendah, tetapi dibangun pula sekolah menengah, sekolah keguruan, dan sekolah tinggi. Namun pengajaran di sekolah-sekolah tersebut hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, sedangkan bagi anak-anak perempuan hanya memperoleh pendidikan di rumah dan di lingkungan keluarga.

Salah satu adat yang mengikat kaum perempuan adalah pingitan. Pingitan merupakan adat yang mengharuskan anak-anak gadis yang telah berusia matang (biasanya 12 tahun) untuk tetap tinggal di rumah hingga mereka menikah ketika berusia 15 atau 16 tahun. Adat pingitan biasanya berlaku pada masyarakat Jawa, khususnya dari golongan priyayi, lihat Stuers. Pada masa kolonial Belanda pendidikan Islam di sebut juga dengan bumiputera, karena yang memasuki pendidikan islam seluruhnya orang pribumi indonesia. Pendidikan islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga macam,yaitu: Pertama; Sistem pendidikan peralihan Hindu Islam. Kedua; Sistem pendidikan *surau* (langgar). Ketiga; Sistem pendidikan pesantren.

Secara konsep politik Etis sangat baik karena adanya keberpihakan kepada kaum pribumi.Namun dalam pelaksanaannya kolonial Belanda bekerjasama dengan kaum liberal (pemegang saham), tetap mengeksplotir daerah jajahannya untuk kepentingan ekonominya. Dalam menjalankan politik Etis Belanda menerapkan trilogy program, yaitu meliputi: edukasi

(pendidikan), irigasi (pengairan) dan transmigrasi (pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah perkebunan jawa).

Disamping trilogi program tersebut, penjajah Belanda menerapkan prinsip assosiasi, asimilasi, dan unifikasi. tetapi betapapun kekhawatiran yang timbul, agaknya kepentingan dan pertimbangan politik lebih mereka utamakan. karena itu pelaksanaan politik Etis secara murni, sedikit banyaknya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kelanjutan politik kolonialis mereka. diantara pertimbangan itu adalah pertama, memilih sistem pendidikan yang dapat memenuhi tuntunan moral politik Etis, tapi juga dapat mendukung kepentingan politik penjajahnya. kedua, berusaha memenuhi bertanggung jawab untuk mendidik dan mencerdaskan rakyat yang mayoritas muslim dan disamping itu juga berusaha meredam kekuatan yang mungkin timbul dari pengaruh fanatisme keagamaan mereka.

Meskipun sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah belum dapat mencukupi kebutuhan pendidikan untuk masyarakat, tapi sekolah-sekolah itu ikut membawa perubahan dalam bidang pendidikan di Indonesia. sekolah-sekolah sistem barat (Belanda) tersebut mendorong timbulnya pemikiran baru bagi pengelola pendidikan Islam di tanah air. Sistem pendidikan pondok pesantren mulai mendapat sorotan karena dinilai kolot, serta sudah tidak mampu memenuhi tuntunan dan kebutuhan zaman. Sebaliknya, para penyelenggara pondok pesantren merasa, bahwa sikap menutup diri terhadap dunia luar, erat kaitannya dengan usaha mempertahankan kemurnian agama dari unsur pengaruh budaya barat yang modern. Sebaliknya, adapula yang berpendirian, bahwa kaum muslimin harus berusaha menemukan sumber kekuatan barat dan memilikinya. Usaha ini dilakukan dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi barat untuk memperkuat masyarakat Islam. kedua pendapat tersebut, menurut Edward Montimer merupakan kunci pemikiran pemuka-pemuka Islam ketika itu. Kalangan pembaru ini selanjutnya berpendapat, bahwa faktor yang menyebabkan keterbelakangannya umat islam terletak pada kelemahan sistem pendidikan islam yang ada. Untuk itu mereka mengadakan pembaruan dibidang pendidikan\ dengan menyelenggarakan sistem madrasah, sebagai hasil integrasi antara sistem pendidikan barat dengan sistem pesantren.

Di Indonesia usaha dan gerakan pembaru itu dalam bidang pendidikan dimulai pada pertengahan abad ke-20, seperti yang dilakukan oleh kaum muda di Minangkabau, Jami'at Khair, Muhammadiyah, al Irsyad, Persyarikatan Ulama, Persis dan lainlainya. Sebagai dampak sampingan dari pembaruan itu pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan dalam berbagai aspek seperti, sistem, kelembagaan, administrasi, penyelenggara, maupun tamatan institusi pendidikan itu sendiri. perubahan tersebut, tampaknya memberi kesan, bahwa

pembaruan pendidikan Islam di Indonesia yang berorientasi pada modernisasi, menunjukkan dirinya sebagai bentuk respon terhadap sekolah-sekolah pemerintah Belanda yang netral agama. Adapun tentang ordonansi (peraturan pemerintah) Guru/Sekolah Liar.

Sehubungan dengan berdirinya madrasah dan sekolah agama yang diselenggarakan oleh kalangan Islam pembaru, agaknya kekhawatiran pemerintah tersebut cukup beralasan. Semula memang pemerintah membiarkan kehidupan islam pada batas-batas tertentu, sepanjang tidak mengganggu kehadiran Belanda, sambil mengembangkan sistem persekolahan pada pengetahuan dan keterampilan duniawi, yaitu pendidikan umum; sebagai pencerminan dari sikap pemerintah Belanda untuk tidak mencampuri lebih jauh masalah Islam. Tetapi setelah melihat perkembangan lebih lanjut, seperti peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah swasta sebagai institusi pendidikan diluar sistem persekolahan pemerintah, kalangan pemerintah semakin hati-hati terhadap sikap netral mereka selama ini. Masalah Islam yang menjadi sumber kekhawatiran pemerintah tersebut agaknya tidak terbatas adanya institusi pendidikannya saja. Lebih jauh dari itu, mereka memandang kemungkinan infiltrasi pengaruh Islam tersebut di sekolah-sekolah swasta lainnya.

Adanya latar belakang tersebut pula barangkali, yang mendorong pemerintah Belanda merubah sikapnya dalam menghadapi kemungkinan buruk yang bakal timbul dari peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sebagai tindakan pencegahan, langkah itu dilakukan melalui pengawasan terhadap sekolah-sekolah liar. sejak adanya perubahan sikap tersebut, dalam rangka pengawasan dikeluarkan ordonansi tanggal 28 Maret 1923 Lembaran Negara no 136 dan 260. aslinya berupa pembatasan kebebasan mengajar bagi guru-guru sekolah swasta. Sistem ini tidak memberi keuntungan bagi perkembangan institusi pendidikan Islam. Bahkan dalam ordonansi yang dikeluarkan tahun 1932, dinyatakan bahwa semua sekolah yang tidak di bangun pemerintah atau tidak memperoleh subsidi dari pemerintah, diharuskan minta izin terlebih dahulu, sebelum sekolah itu didirikan. Dengan kebijakan ini pemerintah kolonial Belanda mendapat reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam terlebih di Minangkabau. Hal ini karena umat Islam Minangkabau melihat adanya “sesuatu” yang akan merugikan Agama Islam jika kebijakan ini dilaksanakan.

Atas reaksi yang sedemikian besar, akhirnya pemerintahan Belanda melalui Gubernur Jendralnya memberi jawaban bahwa ordonansi guru di Minangkabau belum ada niat kapan untuk dilaksanakan. Lambat laun eksistensi ordonansi guru tidak lagi ada urgensinya, dan akhirnya kebijakan ini di batalkan dan hilang dari peredaran. walaupun sebelum keputusan ini di buat sesungguhnya Belanda telah berusaha membujuk rayu beberapa tokoh Islam Minangkabau untuk mendukung pelaksanaan ordonansi ini, namun mereka tidak berhasil.

3. KESIMPULAN

Munculnya penyebaran islam di Indonesia dimulai dari berdirinya kerajaan di Aceh dan lambat laun berkembang hingga ke pulau jawa yaitu dengan berdirinya kerajaan Demak. kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut maka penyiaran agama Islam semakin luas serta pendidikan dan pengajaran Islam pun bertambah maju.

politik etis atau politik balas budi pemerintah kolonial Belanda kepada rakyat jajahan Indonesia merupakan kebijakan pemerintah kerajaan Belanda untuk membalas pengorbanan rakyat Indonesia selama dilaksanakannya *cultuur stelsel* atau sistem tanam paksa. rakyat Nusantara.

Secara konsep politik Etis sangat baik karena adanya keberpihakan kepada kaum pribumi, namun dalam pelaksanaannya kolonial Belanda bekerjasama dengan kaum liberal (pemegang saham), tetap mengeksplorir daerah jajahannya untuk kepentingan ekonominya. Dalam menjalankan politik Etis Belanda menerapkan trilogy program, yaitu meliputi: edukasi (pendidikan), irigasi (pengairan) dan transmigrasi (pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah perkebunan jawa). Disamping trilogy program tersebut, penjajah Belanda menerapkan prinsip assosiasi, asimilasi, dan unifikasi. tetapi betapapun kekhawatiran yang timbul, agaknya kepentingan dan pertimbangan politik lebih mereka utamakan. karena itu pelaksanaan politik Etis secara murni, sedikit banyaknya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut kelanjutan politik kolonialis mereka.

Para penyelenggara pondok pesantren merasa, bahwa sikap menutup diri terhadap dunia luar, erat kaitannya dengan usaha mempertahankan kemurnian agama dari unsur pengaruh budaya barat yang modern. Sebaliknya, adapula yang berpendirian, bahwa kaum muslimin harus berusaha menemukan sumber kekuatan barat dan memilikinya. Usaha ini dilakukan dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi barat untuk memperkuat masyarakat islam.

Atas reaksi yang sedemikian besar, akhirnya pemerintahan Belanda melalui Gubernur Jendralnya memberi jawaban bahwa ordonansi guru di Minangkabau belum ada niat kapan untuk dilaksanakan. Lambat laun eksistensi ordonansi guru tidak lagi ada urgensinya, dan akhirnya kebijakan ini di batalkan dan hilang dari peredaran. walaupun sebelum keputusan ini di buat sesungguhnya Belanda telah berusaha membujuk rayu beberapa tokoh Islam Minangkabau untuk mendukung pelaksanaan ordonansi ini, namun mereka tidak berhasil.

DAFTAR REFERENSI

Akhiruddin. "Lembaga Pendidikan Islam Di Nusantara." *JURNAL TARBIYA* 1, no. 1 (2015): 196.

- Cora Vreede-de. *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan Dan Pencapaian*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008).
- Hasbullaah. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hasnida. "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme Dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu)." *KORDINAT* 17, no. 2 (2017).
- Kepresidenan, Museum. "Politik Etis, Sebagai Awal Lahirnya Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional." *Kebudayaan.Kemdikbud*, 2019.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/politik-etis-sebagai-awal-lahirnya-tokoh-tokoh-pergerakan-nasional>.
- Mansur dan Mahfud Junaedi. *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2005.
- MIZWAR, DIKKI. *DAMPAK KEBIJAKAN POLITIK ETHIS TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN RAKYAT PALEMBANG TAHUN 1900-1942 (SEBAGAI SUMBANGAN MATERI SEJARAH DI SMA NEGERI 2 PALEMBANG)*. Palembang, 2019.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*,. Ciputat: Quantum Teaching, 2005.
- Suhartono. "Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2001, 27.
- Zuharini dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008.